



PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KARANGANYAR  
dan  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : 470/2565.12/XI/2020

NOMOR : 470/468.1/XI/2020

TENTANG

HAK AKSES DAN PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN,  
DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK  
YANG DIGUNAKAN UNTUK VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA  
PADA LAYANAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Pada hari ini selasa tanggal sepuluh bulan november tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, kami yang bertanda tangan di bawah ini, masing-masing :

- I. ANY INDRI HASTUTI : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, berkedudukan di Jalan Kapten Mulyadi Cangakan Karanganyar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
- II. SUNDORO BUDHI KARYANTO : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar, berkedudukan di Jalan Brigjen Slamet Riyadi Bibis Jungke Karanganyar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kersama ini disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa PIHAK KESATU adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Karanganyar di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bertanggungjawab kepada Bupati dan berwenang serta berkewajiban melayani hak akses dan pemanfaatan data kependudukan kepada Organisasi Perangkat Daerah dan Badan Hukum Indonesia yang tidak mempunyai hubungan vertikal dengan Instansi tingkat pusat;
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Karanganyar di bidang Penanggulangan Bencana Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati sebagai pihak yang berwenang mengurus pelaksanaan verifikasi dan validasi data pada layanan BPBD Kabupaten Karanganyar;

|              |             |
|--------------|-------------|
| PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA |
|              |             |

3. bahwa untuk menindaklanjuti surat Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor : 470/..... tanggal ..... November 2020 perihal Permohonan Akses DWH Terpusat, IP LAN dan User ID Development;
4. Surat persetujuan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor : 470/11830/DUKCAPIL Tanggal 04 November 2020.

Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
6. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);
7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 113);
12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 93);
13. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan.

|              |             |
|--------------|-------------|
| PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA |
| 0            | 5           |

PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Kerjasama tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dalam lingkup tugas BPBD Kabupaten Karanganyar dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran PARA PIHAK dalam rangka verifikasi dan validasi data pada layanan PIHAK KEDUA melalui Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

Pasal 2  
KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban untuk :
- a. memberikan hak akses secara terbatas data kependudukan berupa Nomor KK, NIK, Nama Lengkap, Jenis Kelamin, Tempat Lahir, Tanggal/Bulan/Tahun Lahir, Status Perkawinan, Jenis Pekerjaan dan Alamat Sekarang kepada PIHAK KEDUA melalui NIK;
  - b. memfasilitasi PIHAK KEDUA dengan Dinas Kominfo terkait penyediaan jaringan komunikasi data yang bersifat tertutup (bukan internet) untuk menjaga kerahasiaan data kependudukan;
  - c. memberikan *user id* dan *password* kepada PIHAK KEDUA yang pengelolaannya menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA;
  - d. memberikan spesifikasi teknis perangkat pembaca KTP Elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - e. memberikan bimbingan teknis dan pendampingan teknis implementasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik atas biaya PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk :
- a. mencantumkan NIK yang sudah dijamin ketunggalannya dalam dokumen yang diterbitkan PIHAK KEDUA;
  - b. memberikan data balikan berupa data Nomor ID Penerima Bantuan dan Jenis Bantuan guna melengkapi *database* kependudukan milik PIHAK KESATU;
  - c. bertanggungjawab sebagai pemegang hak akses atas data kependudukan yang diakses dari PIHAK KESATU;
  - d. melakukan mekanisme akses data melalui *Web Portal (call NIK)* dengan Jaringan Tertutup dan penggunaan perangkat pembaca KTP Elektronik;
  - e. memberikan layanan penanggulangan bencana daerah berbasis KTP Elektronik dan tidak mempertimbangkan tempat penerbitan KTP Elektronik;
  - f. menyediakan tenaga teknis dan perangkat pembaca KTP Elektronik, sesuai dengan spesifikasi yang diberikan PIHAK KESATU beserta kartu *secure access module (SAM)*;
  - g. menyediakan dukungan anggaran untuk pelaksanaan bimbingan teknis dan pendampingan teknis implementasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik;
  - h. membantu sosialisasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik melalui media sosial PIHAK KEDUA;
  - i. menjamin kerahasiaan, keutuhan dan kebenaran data, serta tidak melakukan penyimpanan data kependudukan yang telah diakses dari PIHAK KESATU dan tidak memberikan data kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini telah berakhir.

Pasal 3  
HAK PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak untuk :
- a. mengawasi pelaksanaan kewajiban PIHAK KEDUA;

| PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA |
|--------------|-------------|
| 4            | 5           |

- b. menerima data balikan berupa data Nomor ID Penerima Bantuan dan Jenis Bantuan dari PIHAK KEDUA yang data kependudukannya telah diakses oleh PIHAK KEDUA berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini, untuk melengkapi *database* kependudukan; dan
  - c. mendapatkan jaminan dari PIHAK KEDUA terhadap kerahasiaan, keutuhan dan kebenaran data yang telah diakses oleh PIHAK KEDUA serta tidak dilakukannya penyimpanan dan tidak diberikannya data kependudukan kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini telah berakhir.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk :
- a. mendapatkan hak akses secara terbatas data kependudukan berupa Nomor KK, NIK, Nama Lengkap, Jenis Kelamin, Tempat Lahir, Tanggal/Bulan/Tahun Lahir, Status Perkawinan, Jenis Pekerjaan dan Alamat Sekarang dari PIHAK KESATU melalui NIK;
  - b. mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan teknis pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik serta penggunaan perangkat pembaca KTP Elektronik, atas biaya PIHAK KEDUA;
  - c. menerima *user id* dan *password* dari PIHAK KESATU yang pengelolaannya menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA; dan
  - d. mendapatkan fasilitasi dari PIHAK KESATU dengan Dinas Kominfo terkait penyediaan jaringan komunikasi data yang bersifat tertutup (bukan internet) untuk menjaga kerahasiaan data kependudukan.

Pasal 4  
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini oleh PARA PIHAK sampai dengan tanggal 9 November 2022 dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 5  
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA

Perjanjian Kerjasama ini berakhir apabila :

- (1) jangka waktu Perjanjian Kerjasama telah berakhir dan/atau atas kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri Kerjasama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini berakhir; dan
- (2) adanya perubahan terhadap kelembagaan PIHAK KEDUA, sehingga perlu pembaharuan Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 6  
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dan apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK.

Pasal 7  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini antara PARA PIHAK akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

|              |             |
|--------------|-------------|
| PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA |
| 0            | 5           |

Pasal 8  
EVALUASI DAN PELAPORAN

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat laporan berkala pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik per semester, bulan Juni untuk semester pertama dan bulan Desember untuk semester kedua kepada PIHAK KESATU.
- (2) PIHAK KESATU melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik secara berkala atas laporan dari PIHAK KEDUA sebagaimana dirnaksud pada ayat (1).
- (3) PIHAK KESATU dapat melaksanakan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik sewaktu-waktu.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh PIHAK KESATU kepada Bupati Karanganyar.

Pasal 9  
LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2), maka PIHAK KESATU dapat mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerjasama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan PARA PIHAK yang dituangkan dalam *Adendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini mengacu kepada Petunjuk Teknis yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 10  
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama aslinya yang dibubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK dengan dicap stempel resmi.

TERAI  
MPEL  
888AHF36024-2  
000  
RIBURUPIAH

PIHAK KEDUA

SUNDORO BUDHI KARYANTO

PEMERINTAH KABUPATEN  
DISDUKCAP  
ANY INDRISASTUTI  
KARANGANYAR

## PETUNJUK TEKNIS



Nomor : 470/ 2565.12/ XI/ 2020

Hal : Petunjuk Teknis Perjanjian Kerjasama tentang Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik dalam lingkup tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar, antara Disdukcapil Kabupaten Karanganyar dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor : 470/ 2565.12/ XI/ 2020 dan Nomor : 470/ 468.1/ XI/ 2020 tanggal 10 November 2020.

Peserta :

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar

| NO | PEMBAHASAN            | KESEPAKATAN  |
|----|-----------------------|--|
| 1  | Infrastruktur Network | <p>Jaringan Komunikasi Data (Jarkomdat) yang digunakan untuk Pemanfaatan Data Kependudukan antara Disdukcapil dengan BPBD adalah Jaringan Tertutup (bukan internet) untuk menjaga kerahasiaan data kependudukan dan disediakan oleh Diskominfo dengan besaran bandwidth 1 Giga byte.</p> <p>BPBD Karanganyar akan mengajukan surat permohonan Akses DWH Terpusat, <i>IP LAN</i> dan <i>User ID</i> kepada Disdukcapil.</p> <p>Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b dilampiri Surat Pernyataan Penggunaan Jaringan Tertutup.</p> <p>Selanjutnya <i>IP LAN</i> diberikan oleh Disdukcapil kepada BPBD setelah surat sebagaimana dimaksud pada huruf b diterima oleh Ditjen Dukcapil.</p> <p>Proses pemasangan dan uji koneksi jaringan komunikasi data akan selesai dilakukan paling lambat minggu kedua bulan November 2020.</p>                  |
| 2  | Sistem Aplikasi       | <p>BPBD melakukan implementasi hak akses verifikasi dan validasi data kependudukan melalui <i>Web Portal</i>.</p> <p>Elemen data yang dapat dimanfaatkan melalui hak akses verifikasi dan validasi data kependudukan, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Nomor KK</li><li>NIK</li><li>Nama lengkap</li><li>Jenis kelamin</li><li>Tempat lahir</li><li>Tanggal/ bulan/ tahun lahir</li><li>Status perkawinan</li><li>Jenis pekerjaan</li><li>Alamat sekarang</li></ul> <p>Hak akses verifikasi data kependudukan melalui Web Portal BPBD sebagaimana dimaksud huruf b dilakukan melalui NIK.</p> <p>Dalam rangka implementasi akses Web Portal, maka BPBD mengajukan surat permohonan User ID kepada Disdukcapil tembusan disampaikan kepada Dirjen Dukcapil terkait persetujuan kuota aksesnya, paling lambat akhir bulan Desember 2020.</p> |

|   |                       |   |
|---|-----------------------|---|
|   |                       | <p>Selanjutnya Disdukcapil memberikan sebanyak 1 (satu) User ID dengan kuota akses sebanyak 1.000 (seribu) Hit NIK perhari dengan format sebagaimana terlampir.</p> <p>Kolom permohonan <i>User ID</i> dari BPBD kepada Disdukcapil mencantumkan :</p> <p>Nomor Induk Kependudukan<br/> Nama Lengkap<br/> Nomor Induk Pegawai<br/> Status Kepegawaian<br/> Jabatan<br/> Kode Wilayah Kantor<br/> Nama dan Alamat Kantor<br/> <i>User ID</i> Lokal Hak Penerima Akses pada aplikasi internal BPBD.<br/> <i>Output</i> dari huruf adalah <i>username dan password</i>.</p> <p>Penanggungjawab dan pemohon <i>User ID</i> adalah Kepala BPBD, yang bertanggungjawab penuh terhadap penggunaan <i>User ID</i> tersebut yang digunakan untuk verifikasi dan validasi data pada layanan BPBD Kabupaten Karanganyar.</p> <p>Disdukcapil menyerahkan <i>User ID</i> kepada BPBD paling lambat 2 (dua) minggu setelah surat permohonan <i>User ID</i> diterima.</p> <p>Selanjutnya BPBD dapat mengajukan besaran kuota hak akses yang disertai dengan kajian teknis sesuai kebutuhan kuota, dengan mengajukan surat permohonan pengajuan <i>User ID</i> kepada Disdukcapil tembusan Dirjen Dukcapil Iterkait persetujuan penambahan kuota aksesnya, paling lambat akhir bulan Desember 2020.</p> |
| 3 | Aplikasi Data Balikan | <p>BPBD wajib memberikan data balikan kepada Disdukcapil berupa data Daerah Rawan Bencana di Kabupaten Karanganyar.</p> <p>Spesifikasi petunjuk teknis berupa <i>JSON, script</i> aplikasi data balikan, pedoman penggunaan aplikasi, <i>user name, password</i> dan Token untuk <i>Web Portal</i> adalah sebagaimana terlampir.</p> <p>BPBD me akukan implementasi hak akses data kependudukan melalui <i>Web Portal</i> aplikasi data balikan dalam bentuk format <i>JSON</i>.</p> <p>Dalam aplikasi data balikan ada 3 (tiga) metode yaitu :</p> <p>Metode <i>Upload Data Exel</i>atau <i>CSV</i>.<br/> Metode <i>Form Online</i>.<br/> Metode <i>Web Service</i>.</p> <p>BPBD melakukan pengiriman data balikan melalui aplikasi data balikan dengan menggunakan metode <i>Web Service</i> dan <i>Upload Data Exel</i>.</p> <p>BPBD dapat melakukan pengiriman data balikan melalui aplikasi data balikan dengan metode <i>Web Service</i> dan <i>Upload Data Exel</i>, dalam hal ini Ditjen Dukcapil masih dalam tahap mengembangkan system aplikasi data balikan untuk daerah, maka BPBD dapat mengirimkan data balikan melalui media penyimpanan (flasdisk, CD, DVD dll) dan dikirim kepada Disdukcapil dan diteruskan kepada Dirjen Dukcapil.</p>                               |

|   |   |  |
|---|---|--|
| 4 | Perangkat Pembaca KTP Elektronik ( <i>Card Reader</i> ) | <p>BPBD wajib melakukan pemanfaatan KTP Elektronik melalui pengadaan Perangkat Pembaca (<i>Card Reader</i>) KTP Elektronik minimal 1 (satu) unit di setiap unit kerja dalam waktu 1 (satu) tahun.</p> <p>BPBD melakukan proses pengadaan Perangkat Pembaca (<i>Card Reader</i>) KTP Elektronik secara mandiri kepada penyedia Perangkat Pembaca (<i>Card Reader</i>) KTP Elektronik.</p> <p>BPBD wajib melakukan pengajuan awal personalisasi dan aktivasi kartu SAM yang terintegrasi di dalam Perangkat Pembaca (<i>Card Reader</i>) KTP Elektronik pada Disdukcapil melalui aplikasi SIFILMA pada URL <a href="https://sifilma.kemendagri.go.id">https://sifilma.kemendagri.go.id</a>.</p> <p>User ID dan manual aplikasi SIFILMA diberikan sebagai bagian dari Petunjuk Teknis ini.</p> <p>Aktivasi penggunaan kartu SAM berlaku selama Perjanjian Kerjasama masih berlaku.</p> <p>Dalam hal Perjanjian Kerjasama berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan, BPBD wajib mengembalikan <i>configuration file</i> kartu SAM kepada Disdukcapil untuk dilakukan penonaktifkan/deaktivasi SAM <i>Card Reader</i> KTP Elektronik.</p> |
| 5 | Evaluasi dan Pelaporan                                  | <p>Sebagai bentuk evaluasi berkala BPBD wajib membuat laporan berkala mengenai pelaksanaan pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik kepada Disdukcapil setiap semester atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.</p> <p>Laporan pemanfaatan data kependudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat disampaikan secara manual atau melalui <a href="http://pemanfaatanonline.dukcapil.kemendagri.go.id">http://pemanfaatanonline.dukcapil.kemendagri.go.id</a>.</p> <p>Disdukcapil melakukan evaluasi Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik secara berkala setiap semester atas laporan BPBD sebagaimana dimaksud pada huruf a atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.</p> <p>Format laporan pemanfaatan data kependudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat diunduh dari laman <a href="http://pemanfaatanonline.dukcapil.kemendagri.go.id">http://pemanfaatanonline.dukcapil.kemendagri.go.id</a>.</p>  |
| 6 | Lain - Lain   | <p>Petunjuk Teknis ini adalah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama untuk dilaksanakan Para Pihak.</p> <p>Kontak person (PIC) dari masing-masing pihak :</p> <p>Disdukcapil Kabupaten Karanganyar :</p> <p>Gunawan, S.H., M.M. : 085227588577<br/> Mulyono Puji S, S.Sos. : 082327171880<br/> Eko Agus Santoso, S.Kom. : 083857587055</p> <p>BPBD Kabupaten Karanganyar :</p> <p>Suwardi Aris indriyatmoko : 081326713177<br/> Tri Waluyo, SE : 08112906395</p> <p>Apabila diperlukan pertemuan teknis lanjutan terkait aplikasi data balikan dan hal-hal teknis lainnya dalam rangka optimalisasi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, maka akan dikoordinasikan sebelumnya.</p>  |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <p>Penanggung jawab penerima Hak Akses dari BPBD wajib menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bermaterai.</p> <p>Seluruh operator yang memanfaatkan Hak Akses verifikasi data kependudukan dari BPBD wajib menandatangani <i>Non-Disclosure Agreement (NDA)</i>/ pernyataan menjaga kerahasiaan data.</p> <p>BPBD menginformasikan kepada Disdukcapil lterkait pergantian pemangku jabatan BPBD ataupun perubahan struktur organisasi melalui surat pemberitahuan yang dialamatkan ke Kantor Disdukcapil Jalan Kapten Mulyadi Cangkakan Karanganyar, dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung.</p> <p>Dalam halBPBD tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama maka Disdukcapil dapat mengakhiri Perjanjian Kerjasama dan mencabut hak akses data kependudukan.</p> <p>Disdukcapil dapat melakukan evaluasi teknis pemanfaatan data kependudukan sewaktu-waktu.</p> |
|--|--|--|

Karanganyar, 21 Desember 2020

MENGETAHUI,

DISDUKCAPIL  
KABUPATEN KARANGANYAR

BPBD  
KABUPATEN KARANGANYAR

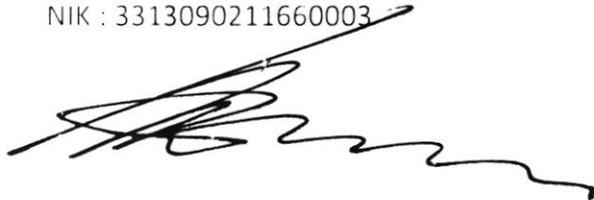
MULYONO PUJI S, S.Sos.  
NIK : 3313092003770003



GUNAWAN, S.H., M.M.  
NIK : 33130507056400C1



SUWARDI ARIS INDRIYATMOKO, SE.MM  
NIK : 3313090211660003



SUNDORO BUDHI KARYANTO, S.Sos  
NIK : 3313152006720001



**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK  
PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN NASIONAL**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

**NAMA** : SUNDORO BUDHI KARYANTO, S.Sos.  
**JABATAN** : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Karanganyar  
**ALAMAT KANTOR** : Jalan Brigjen Slamet Riyadi Karanganyar, Telepon (0271)  
495997

Sebagai penanggung jawab atas hak akses data kependudukan nasional berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Disdukcapil Kabupaten Karanganyardan BPBD Kabupaten Karanganyar Nomor : 470/2565.12/XI/2020 dan Nomor: 470/468.1/XI/2020 tanggal 10 November 2020 tentang Pemanfaatan NomorInduk Kependudukan, Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dalam lingkup tugas BPBD Kabupaten Karanganyar dan Petunjuk Teknis (Juknis) Saya menyatakan :

1. Menjamin kerahasiaan, keutuhan, keamanan dan kebenaran, serta tidak dilakukan penyimpanan terhadap Data Kependudukan Nasional yang diakses oleh BPBD Kabupaten Karanganyar dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri dengan menggunakan jaringan tertutup (bukan jaringan publik) sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan.
2. Menjamin bahwa Data Kependudukan Nasional yang diakses oleh BPBD Kabupaten Karanganyar dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri tidak diberikan kepada pihak lain, termasuk setiap informasi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam kaitan dengan pemanfaatan Data Kependudukan Nasional yang bersifat rahasia. Informasi "Rahasia" meliputi :
  - a. Data kependudukan;
  - b. *Application Programming Interface* (API) hak akses *database* kependudukan;
  - c. *IP Address Local* (IP LAN); dan
  - d. *User ID*.
3. Mematuhi kebijakan pemanfaatan data kependudukan termasuk didalamnya kebijakan Sanksi baik bersifat Administratif maupun Pidana dalam hal terdapat pelanggaran penggunaan hak akses data kependudukan yang telah diberikan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan pelaksanaannya.
4. Dalam hal implementasi penggunaan hak akses data kependudukan tidak sesuai dengan Perjanjian Kerjasama dan Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud di atas serta hasil *Proof of Concept* (PoC) sehingga berakibat hukum, menjadi tanggung jawab mutlak BPBD Kabupaten Karanganyar.

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Pemanfaatan Data Kependudukan Nasional ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Karanganyar, 21 Desember 2020



**SUNDORO BUDHI KARYANTO, S.Sos.**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19720620 199203 1 002



## SURAT MENJAGA KERAHASIAAN

Ref.SOP No :  
SOP/PIAK.4/003  
Klausul ISO 27001  
A.6 1.5 Confidentiality  
Agreement

LOKAS I: BPBD Kabupaten Karanganyar  
Jalan Brigjen Slamet Riyadi Karanganyar, Telepon (0271) 495997

Saya memahami bahwa selama masa penugasan saya atau hubungan konsultasi, saya mungkin memiliki akses terhadap informasi "Rahasia" Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DITJEN DUKCAPIL) dan akses tersebut diberikan melalui perjanjian dan kepercayaan.

Oleh karena itu, saya setuju untuk tidak mengungkapkan secara langsung atau tidak langsung kepada pihak lain yang tidak berwenang, dan setuju untuk tidak memanfaatkan informasi tersebut tanpa izin tertulis dari BPBD Kabupaten Karanganyar, baik selama atau setelah berakhirnya masa kerjasaya tanpa terbatas masa berlakunya kerjasama, termasuk pengetahuan yang saya dapatkan berkaitan dengan rahasia pekerjaan dan informasi rahasia lainnya kecuali untuk dan atas nama BPBD Kabupaten Karanganyar dan hanya dalam ruang lingkup pekerjaan.

Saya juga setuju untuk mematuhi semua kebijakan dan prosedur di DITJEN DUKCAPIL mengenai akses data kependudukan dan kegiatan terkait lainnya. Saya menyadari bahwa ketentuan ini berlaku untuk seluruh informasi rahasia dari pihak lain yang dipercayakan kepada BPBD Kabupaten Karanganyar. Namun, kewajiban ini yang telah tersedia bagi masyarakat umum atau , atau yang diungkapkan pihak ketiga kepada pihak lainnya tanpa kewajiban menjaga kerahasiaan.

Setelah penugasan di BPBD Kabupaten Karanganyar selesai, atau berakhirnya hubungan kerja saya setuju untuk segera mengembalikan seluruh materi tertulis, grafis, atau perangkat fisik milik BPBD Kabupaten Karanganyar yang saya gunakan atau di bawah kendali saya.

Saya setuju bahwa setiap informasi yang diberikan oleh DITJEN DUKCAPIL dalam kaitannya dengan hubungan kerja ini akan dianggap sebagai DITJEN DUKCAPIL dan bersifat rahasia termasuk seluruh informasi yang berhubungan dengan aktivitas pekerjaan masa lalu, sekarang dan nanti, desain/ layanan, dan peluang bisnis lainnya.

Informasi "Rahasia" meliputi:

- Informasi data kependudukan
- Informasi lain yang berklasifikasi "Rahasia" atau "Internal"
- Akses User VPN ( jika ada )
- IP Server, user dan password server, database dan aplikasi yang ada terkait pengecekan/ inquiry data kependudukan ke Ditjen Dukcapil

Nama : Tri Waluyo, SE

Tandatangan : 

Instansi : BPBD Kabupaten Karanganyar

Tanggal : 21 Desember 2020

Alamat : Jaten Baru RT 004, RW 009, Kelurahan Sedayu, Kecamatan Jumantono

Rumah

\*Keterangan : Semua Operator wajib menandatangani Surat Pernyataan Menjaga Kerahasiaan Data

PROVINSI JAWA TENGAH  
KABUPATEN KARANGANYAR

NIK : 3313041705800001

Nama : TRI WALUYO  
Tempat/Tgl Lahir : KARANGANYAR, 17-05-1980  
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : B  
Alamat : JATEN BARU  
RT/RW : 004/009  
Kel/Desa : SEDAYU  
Kecamatan : JUMANTONO  
Agama : ISLAM  
Status Perkawinan : KAWIN  
Pekerjaan : PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)  
Kewarganegaraan : WNI  
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



KARANGANYAR  
13-03-2018

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Tri Waluyo', written over the date and location text.



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Alamat : Jl. Brigjen Slamet Riyadi No.- Bibis, Jungke, Karanganyar  
Telp/ Faks (0271) 495997 E-mail : bpbdd@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57713

Nomor : 470/SSS/XII/2020  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) bendel  
Perihal : Permohonan Akses DWH Terpusat,  
IP LAN, User ID Development dan  
Kuota Akses NIK

Karanganyar, 21 Desember 2020

Kepada :  
Yth. Kepala Disdukcapil  
Kabupaten Karanganyar  
di -  
Karanganyar

Menindaklanjuti surat Kepala Disdukcapil Karanganyar Nomor : 470/ 2562.12/ XI/ 2020 tanggal 10 November 2020 perihal Penyusunan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan, berkaitan dengan pelaksanaan teknis tindak lanjut Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan Berbasis NIK antara Disdukcapil Nomor : 470/2565.12/XI/2020 dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor : 470/468.1/XI/2020 tanggal 10 November 2020 yang merupakan Petunjuk Teknis bagi Para Pihak.

Bersama ini kami mengajukan Permohonan Akses DWH Terpusat, IP LAN, User ID Development dan Kuota Akses NIK untuk Pelayanan Penanggulangan Bencana Daerah dan bersama ini pula kami kirimkan data Petugas Operator Pengelola Sistem dan Aplikasi DWH Terpusat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar dengan data sebagai berikut :

A. Permohonan User ID :

- a. Nama Instansi : BPBD Karanganyar
- b. Alamat Instansi : Jl. Brigjen Slamet Riyadi, Bibis, Jungke, Karanganyar
- c. Nama PIC (Teknis) : Suwardi Aris Indriyatmoko, SE.MM
- d. Nomor HP PIC : 081326713177
- e. Nama Pimpinan : Sundoro Budhi Karyanto, S.Sos
- f. NIK : 3313152006720001
- g. NIP : 19720620 199203 1 002
- h. Jabatan : Kepala Pelaksana

B. Petugas Operator Pengelola Sistem dan Aplikasi DWH Terpusat :

- a. Nama lengkap : Tri Waluyo, SE
- b. NIK : 3313041705800001
- c. NIP : 19800517 201001 1 005
- d. Jabatan : Perencana Kebutuhan Logistik
- e. Nomor HP : 08112906395

C. Usulan Kuota Akses NIK :

- a. 1.000 (seribu) Hit NIK per hari.

Demikian dan atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.



Tembusan :

1. Bupati Karanganyar (sebagai laporan)